

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka diperlukan uraian batasan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. Adapun batasan konsep penelitian yang dimaksud yakni meliputi Kebijakan Publik, Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Hiburan yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

A. Kebijakan Publik Sebagai Strategi Pemerintah

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu pemerintah. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Kebijakan publik mempunyai banyak pemahaman teoritis. David Easton dalam H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho mendefinisikannya sebagai akibat dari aktivitas pemerintah¹. Lebih lanjut Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan².

Carl I. Friedrich dalam Riant Nugroho mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu³.

¹H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012. hal:183

²*Ibid*. Hal:184

³Nugroho, Riant. *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2009. hal:83

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah⁴. Sedangkan menurut Suwitri dalam Suaedi dan Wardianto kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia⁵.

Dari beberapa pengertian-pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa, definisi kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politisi ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif namun juga negatif. Dalam artian bahwa pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

Selain itu pula, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh rakyat⁶. Kebijakan publik juga merupakan hasil atau output yang dihasilkan oleh pemerintah guna mengatasi fenomena atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kota Blitar sendiri masih banyak ditemukan permasalahan yang menyangkut tentang pajak terutama Pajak Hiburan. Oleh karena itu pemerintah harus mempunyai sebuah instrumen atau kebijakan yang

⁴Keban, T.Yeremias. 2004. Enam dimensi strategis administrasi publik, konsep, teori dan isu. Gava Media. Yogyakarta. Hal:60

⁵Suaedi, Valih dan Wardianto, Bintoro. 2010. Revitalisasi administrasi negara, reformasi birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta:Graha ilmu. Hal:138

⁶Madani, Muhlis. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2011. Hlm:20

berisikan strategi yang didalamnya memuat serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah guna memncapai tujuan untuk kepentingan rakyat.

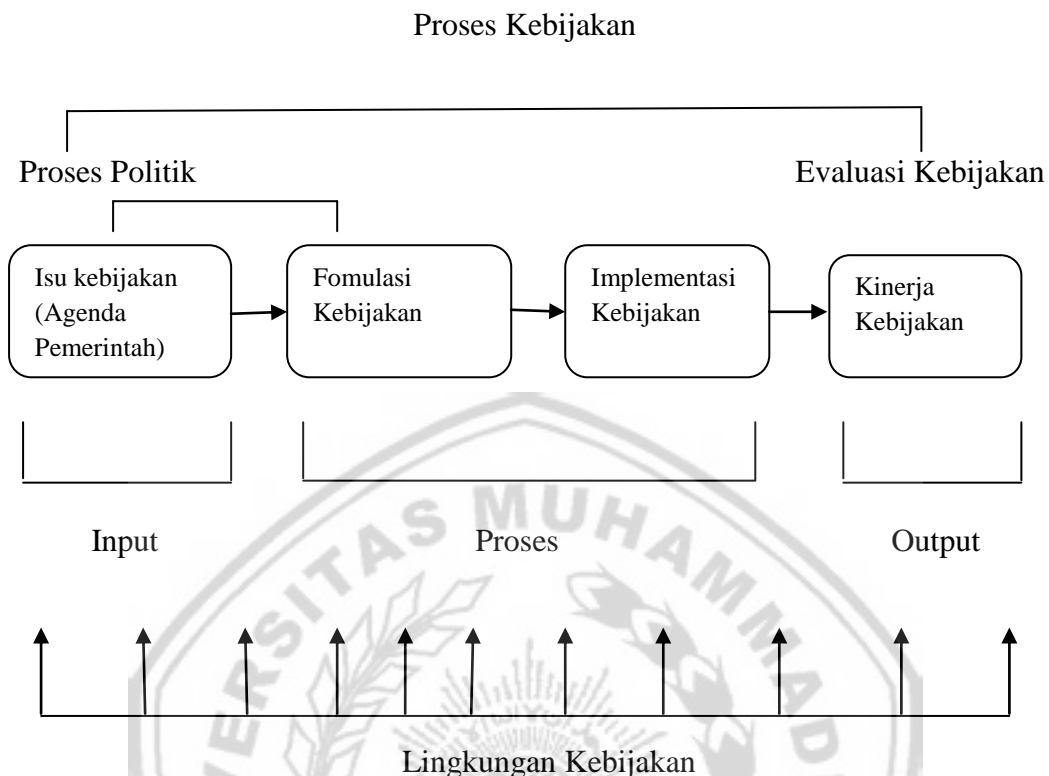
Kota Blitar merupakan sebuah Kota yang mempunyai banyak sekali potensi-potensi hiburan yang bisa memeberikan pendapatan kas daerah apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik. Potensi-potensi hiburan tersebut meliputi tempat hiburan seperti karaoke, tontonan film, dll. Namun dalam pengelolaannya pemerintah menemui berbagai macam hambatan seperti banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan kegiatan usaha hiburannya kepada pemerintah serta masih kurangnya kesadaran wajib pajak hiburan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dari permasalahan tersebut pemerintah harus mempunyai sebuah upaya atau strategi dalam meningkatkan sektor Pajak Hiburan dengan tujuan meningkatkannya PAD. Sehingga hasil yang didapat nantinya bisa berguna untuk kepentingan rakyat atau masyarakat Blitar kedepannya.

Proses dalam penyusunan kebijakan publik sendiri terdiri dari lima serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual⁷.

Model yang dikembangkan oleh para ilmuwan kebijakan publik mempunyai satu kesamaan, yaitu bahwa proses kebijakan berjalan dari formulasi menuju implementasi untuk mencapai kinerja kebijakan. Namun demikian, ada satu pola bahwa model formal proses kebijakan adalah dari “gagasan kebijakan”, “formulasi dan legalisasi kebijakan”, “implementasi”, baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang

⁷AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu. 2008. Hlm:8

diharapkan yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi kinerja kebijakan seperti yang disampaikan pada gambar berikut ini⁸.



Gambar 2.1 : Tahap-tahap Penyusunan Kebijakan

1. Tahap Isu Kebijakan (Penyusunan Agenda Pemerintahan)

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam angka kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda waktu yang lama⁹.

Menurut Cobb dan Elder, agenda dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe.

Pertama, agenda yang bersifat sistematis yaitu agenda yang mencakup seluruh isu

⁸Ibid. Hlm.388

⁹Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : Teori & Proses*. Yogyakarta : MedPress. 2008. Hlm. 33

yang umumnya diakui dan mendapat perhatian publik serta termasuk persoalan yang masuk di dalam yurisdiksi legitimasi pemerintah, contohnya persoalan pendidikan. *Kedua*, agenda institusional yang mencakup seluruh isu-isu dimana para pembuat keputusan yang memang memiliki kewenangan secara eksplisit, aktif dan serius mempertimbangkan sebuah isu untuk diagendakan. Misalnya menjadi agenda legislatif atau eksekutif¹⁰.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih¹¹.

3. Tahap Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan penting adanya kebijakan publik. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah sedemikian rupa akan diterapkan sehingga menjawab permasalahan di masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Anggara, bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan¹². Dalam implementasinya di Kota Blitar kebijakan mengenai pengelolaan pajak hiburan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan tujuan mendapatkan hasil yang

¹⁰Ibid. Hlm. 24

¹¹AG. Subarsono. *Op. Cit.* Hal:12

¹²Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia. Hlm: 232

maksimal dari sektor pajak hiburan guna peningkatan PAD yang pengelolaannya mengacu dan berdasarkan pada Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4. Tahap Kinerja Kebijakan (Evaluasi Kebijakan)

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilakukan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan (hasil kinerja/prestasi yang diharapkan)¹³.

B. Implementasi Kebijakan

Dari beberapa tahapan kebijakan publik yang sudah diuraikan, peneliti memfokuskan kepada implementasi kebijakan. Dengan asumsi upaya pemerintah dalam pengelolaan dan penerapan pajak hiburan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011. Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier dalam Abdul Wahab mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang kemudian output

¹³Ibid. Hlm:34

kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan¹⁴.

Ada beberapa variabel penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variabel-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: “*four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure*”¹⁵.

Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu : *pertama* komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Pertama, dimensi *Transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. *Kedua*, dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. *Ketiga*, dimensi Konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas ditetapkan atau dijalankan. Seperti halnya dalam pengelolaan Pajak Hiburan melalui instrumen Perda No

¹⁴Solichin, Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. RinekaCipta. 1990

¹⁵Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. 1980. Hal: 9-10

7 Tahun 2011, dimana para pembuat kebijakan berkomunikasi dengan seluruh aktor-aktor pelaksana kebijakan seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai *leading sector* dengan aktor pelaksanaan kebijakan lain dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Untuk itu semua aktor pelaksana harus mengetahui serta memahami tentang arah dan kebijakan tersebut. Sehingga tidak akan ada resistensi atau perlawanan dari aktor pelaksana maupun kelompok sasaran yang pada akhirnya akan menghambat keberhasilan kebijakan.

Kedua yaitu sumber daya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau atauran-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan Informasi dan Kewenangan (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan mengenai Pajak Hiburan ini adalah BPKAD sebagai *leading sector*. Dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Sarana prasarana tersebut guna menunjang keberhasilan kebijakan terutama mempermudah pemerintah dalam mengelola Pajak Hiburan. Dimensi Informasi dan Kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini sumber daya kewenangan ditunjukkan melalui tugas dan fungsi BPKAD dalam menerapkan kebijakan pengelolaan Pajak Hiburan sesuai dengan tupoksi dan kemampuannya.

Ketiga yaitu disposisi, yang berarti merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya. Dalam mengatasi permasalahan guna pengoptimalan Pajak Hiburan maka pelaksana kebijakan seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mempunyai perilaku yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh setiap kewajiban yang ada. Tanpa adanya disposisi yang baik dari aktor pelaksana maka tujuan pemerintah dalam pengoptimalan Pajak Hiburan guna peningkatan PAD tidak akan terwujud.

Keempat yaitu struktur birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedurs* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksana yang terpecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Dalam konteks penerapan kebijakan mengenai Pajak Hiburan di Kota Blitar BPKAD sebagai *leading sector* memiliki kewajiban untuk menjalankan peran dan tugas dalam implementasi kebijakan. Dimana semua aktor pelaksana dan aktor BPKAD harus saling berkoordinasi dalam implementasi kebijakan. Karena dalam pembagian kewenangan dalam sebuah organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan koordinasi yang baik pula.

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 13, adalah sebagai berikut :“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”¹⁷.

1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya rumah tangganya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Selanjutnya pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

¹⁶Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta

¹⁷Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah serta digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarnag Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan¹⁹.

b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung²⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu²¹.

- 1) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

¹⁸Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. Hal: 41

¹⁹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

²⁰Kaho, Yosef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada. 1997. Hal:171

²¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Retrubusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat²².

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Berikut yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi²³:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adala nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

²²Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

²³Ibid

- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2. Peranan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 15 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak dan retribusi. Besarnya penerimaan daerah dari sektor PAD akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah²⁴.

Seperti halnya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar melalui BPKAD yang bertugas dalam melakukan upaya maksimal pengumpulan Pajak Hiburan. BPKAD mempunyai peranan penting tercapainya hasil optimal Pajak Hiburan. Dimana tugas dan fungsi BPKAD dalam pengelolaan Pajak Hiburan harus sesuai dengan kompetensi aktor pelaksana. Sehingga hasil yang akan tercapai nanti bisa membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan.

3. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus berupaya secara terus menerus dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian atas pemungutan daerah.

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu pengukuran/penilaian sumber-sumber pendapatan asli daerah agar dapat dipungut

²⁴Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan²⁵.

D. Definisi Pajak

1. Definisi Pajak

Sesungguhnya pajak merupakan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada masyarakat yang ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan kepentingan umum. Lebih lanjut Sumitro menjelaskan bahwa pajak merupakan bentuk peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, sedangkan surplus dari penerimaan pajak digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²⁶

Pengertian pajak ini juga dijelaskan dalam Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁷

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai peranan sangat penting karena pendapatan dari pajak dapat membiayai seluruh pengeluaran

²⁵Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat. 2004. Hal: 96

²⁶Siti Resmi. 2012. *Perpajakan teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 1

²⁷Undang-Undang No 28 Tahun 2007, “Perubahan ke Tiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” hal 2

negara termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut²⁸ .:

a) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Setiap negara membutuhkan biaya untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan dapat terlaksana bila ada dana yang cukup. Dana ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi pendapatan negara. Pendapatan negara ini nantinya yang akan digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara.

b) Fungsi Mengatur (Regulred)

Fungsi mengatur menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, terutama dalam sistem perpajakan yang sejalan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Pajak berfungsi seagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antar pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini menjadi tujuan pokok dari sistem pajak tersebut.

3. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenang yang akan digunakan untuk mengenakan pajak. Asas etrsebut disebut asas pemungutan pajak. Ada beberapa asas utama yang digunakan oleh negara dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu²⁹:

a) Asas Domisili (Asas Tempat tinggal)

Dalam asas domisili ini negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seseorang tersebut tanpa melihat darimana sumber penghasilan

²⁸Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu. Hal: 3

²⁹Early Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, hal 16

atau pendapatannya diperoleh (dari sumber negara yang bersangkutan dimana dia tinggal atau dari sumber luar negeri) dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Jadi pada prinsipnya pengenaan pajak adalah pada seluruh penghasilan subyek pajak dari manapun penghasilan tersebut diperoleh.

b) Asas Sumber

Menurut asas ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan seseorang berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili (apakah berdomisili di dalam atau diluar negara tempat sumber penghasilan tersebut) dan kewarganegaraan wajib pajak. Sasaran pengenaan pajaknya adalah hanya penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak dinegara tersebut.

c) Asas Kebangsaan

Asas ini mengatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang. Yang berhak memungut pajak adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum ada tiga sistem dalam pemungutan pajak yang digunakan, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*³⁰. Sistem ini biasanya digunakan oleh setiap negara sebagai dasar pemungutan pajak di negaranya.

a) *Official Assessment System*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya

³⁰Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 169-170

pajak terhutang wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

- b) *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- c) *Withholding System*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Didalam Peraturan Daerah Kota Blitar No 7 Tahun 20011 pasal 1 ayat 35 dan 36 teradapat dua sistem pemungutan pajak yaitu *OfficialAssessment System* dan *Self Assessment System*³¹.

E. Strategi Peningkatan Pajak

Dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (Pajak Hiburan) maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk

³¹Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pajak Daerah

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan lebih berperan.

- 1) **Intensifikasi**, berasal dari kata intensif yang berarti sungguh-sungguh (giat secara mendalam) untuk memperoleh efek yang maksimal, terutama untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi intensifikasi adalah perihal peningkatan kegiatan yang lebih hebat³². Sedangkan Halim mendefinisikan intensifikasi sebagai suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti³³.
- 2) **Ekstensifikasi**, berasal dari kata ekstensif yang berarti bersifat menjangkau secara luas. Jadi ekstensifikasi adalah perluasan terhadap sesuatu misalnya: tanah, ruang, waktu, jalan dan sebagainya³⁴. Sementara itu Halim memberikan penjelasan yang lebih lengkap, menurutnya ekstensifikasi adalah langkah perluasan atau penambahan jenis pendapatan daerah yang dapat di pungut selain dari pendapatan yang ada³⁵. Berdasarkan pengertian tersebut sesungguhnya ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun demikian dalam upaya ekstensifikasi ini, berkaitan dengan pengelolaan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak

³²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2006. Penerbit. Balai Pustaka. Jakarta, hal 223

³³Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta, hal 113

³⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2006. Penerbit. Balai Pustaka. Jakarta, hal 223

³⁵Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta, hal 117

semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Menurut Halim³⁶, intensifikasi pajak daerah termasuk didalamnya pajak hiburan, diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk: (1) Perubahan Tarif Pajak dan retribusi daerah; (2) Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya dikatakan bahwa Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Kegiatan investasi memberikan kontribusi yang sangat besar dan baik terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada khususnya dan penerimaan pendapatan asli daerah pada umumnya. Untuk itu, kegiatan investasi mutlak diusahakan oleh pemerintah kota/kabupaten melalui kebijakan-kebijakan sebagaiberikut: a. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di kota/kabupaten.

Memberi kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.

Selain itu upaya yang dapat ditempuh daerah untuk meningkatkan PAD melaui kegiatan ekstensifikasi pajak dapat dilakukan melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan (*taxing power*) yang

³⁶Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daearah*. Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta, hal 147

lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Bagi Kabupaten/Kota perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan tarif sampai dengan batas tertentu.

F. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada dikelola tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah³⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan³⁸.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian padaperan Pajak Hiburan guna peningkatan PAD dengan instrumen yang didasarkan pada Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011. Sebagai salah satu pajak daerah di kota Blitar, Pajak Hiburan merupakan sebuah kontribusi wajib dari badan atau orang dalam sektor hiburan yang apabila dikumpulkan dapat digunakan untuk keperluan daerah guna menunjang kemakmuran rakyat. Untuk itulah diperlukan suatu strategi untuk mengoptimalkan hasil dari Pajak Hiburan tersebut.

G. Definisi Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang tergolong kedalam pajak asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat Kabupaten/Kota. Pajak hiburan di beberapa kota besar dijadikan sebagai salah satu jenis pajak yang memiliki

³⁷Ahmad Yani. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hal 52-53

³⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

potensi yang besar untuk menghasilkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Pajak hiburan itu sendiri didefinisikan oleh Nasution sebagai pajak asli daerah yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran yang diselenggarakan³⁹.

Menurut Soelarno, pajak hiburan adalah suatu pertunjukan atau keramaian berupa sandiwara, wayang, bioskop, pertunjukan-pertunjukan di dalam warung kopi, kabaret, sirkus, pertunjukan menyanyi dan musik, balet, dansa, *fancy fair*, pesta, pameran dan pidato, kecuali pameran dan pidato yang sifatnya penerangan, ilmiah, atau keagamaan. Pertunjukan-pertunjukan di dalam pasar malam, pertunjukan dengan alat musik, pertandingan-pertandingan dan pertunjukan olahraga, permainan-permainan yang tergabung meminta pembayaran dari penontonnya⁴⁰.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pasal 2 ayat 2, pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan disini adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga⁴¹.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pemerintahan daerah yang ada di Indonesia, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengenakan atau tidaknya suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat heterogenitas kondisi setiap kabupaten/kota di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan jenis hiburan yang diselenggarakan maka perlu dikeluarkan tentang peraturan daerah tentang pajak hiburan yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemungutan pajak di daerah kabupaten/kota masing-masing.

³⁹Nasution, Agus Salim, dkk. Jakarta. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Karunia Universitas Terbuka. 1986

⁴⁰Soelarno, Slamet. *Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah dalam Terapan)*. Jakarta: STIA LAN Press. 1999

⁴¹Liberty Pandiangan. 2002. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga, hal 389

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada Kota Blitar didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Dasar hukum pemerintah daerah dalam meungut pajak hiburan didasarkan pada peraturan daerah kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. Regulasi tersebut merupakan sebuah dasar bagin pemerintah dalam melangkah saat implementasi kebijakan terutama dalam pengelolaan Pajak Hiburan. Pemerintah dalam hal ini BPKAD tidak boleh keluar dari dasar hukum yang ada dan harus mengacu serta patuh pada instrumen-instrumen tersebut agar pengelolaan pajak daerah terutam Pajak Hiburan bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

5. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah⁴²:

Tabel 2.1 Objek Pajak Hiburan Kota Blitar

NO	Jenis Objek Pajak Hiburan
1.	Tontonan Film
2.	Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana
3.	Kontes kecantikan. Binaraga dan sejenisnya
4.	Pameran
5.	Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6.	Sirkus, akrobat, dan sulap
7.	Permainan bilyar, golf, dan bowling
8.	Pacuan kuda, reflesi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
9.	Pertandingan olahraga

Sumber : Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011

Di Kota Blitar sendiri semua objek hiburan yang tertera dalam Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 sudah sesuai dan nyata keberadaannya. Dimana dari objek-objek Pajak Hiburan inilah pemerintah bisa mendapatkan atau menerapkan pajak hiburan.

6. Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 20 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap

⁴²Berdasarkan Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal:12

penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan⁴³.

7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar, memotong dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku⁴⁴.

Dengan demikian, pada pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak). Dalam hal ini subjek pajak dan wajib pajak hiburan di Kota Blitar harus mematuhi dan bekerja sama dengan pemerintah dalam pembayaran Pajak Hiburan. Sehingga dengan adanya kepatuhan subjek pajak dan wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan maka keoptimalan Pajak Hiburan guna meningkatkan PAD dapat tercapai.

8. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar penegenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

⁴³Ibid. Hal:12

⁴⁴Waluyo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hal: 23

b. Tarif Pajak Hiburan

Besarnya tarif pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 adalah sebagai berikut⁴⁵ :

Tabel 2.2 : Tarif Pajak Hiburan Kota Blitar

No	Objek Pajak Hiburan	Tarif Pajak Hiburan
1	Pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film bioskop.	a. Bioskop sebesar 20% (dua puluh persen) dan b. Bioskop keliling sebesar 10% (sepuluh persen)
2	Pertunjukkan kesenian rakyat/tradisional, lukis dan tari.	10% (sepuluh persen)
3	Kegiatan kontes binaraga dan sejenisnya	15% (lima belas persen)
4	Pertunjukkan sirkus, akrobat dan sulap	15% (lima belas persen)
5	Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan	15% (lima belas persen)
6	Kegiatan pagelaran musik dan busana	20% (dua puluh persen)
7	Kegiatan pameran	20% (dua puluh persen)
8	Kegiatan konteks kecantikan	20% (dua puluh persen)
9	Kegiatan panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes Center)	35% (tiga puluh lima persen)
10	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya	40% (empat puluh persen)
11	Permainan bilyard, golf dan bowling	25% (dua puluh lima persen)
12	Pertandingan olahraga	15% (lima belas persen)

Sumber :Perda Nomor 07 Tahun 2011 Kota Blitar

8. Dasar Penghitungan Pajak Hiburan

Gambar 2.1 : Rumus Perhitungan Pajak Hiburan Kota Blitar

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{jumlah Pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada hiburan}\end{aligned}$$

⁴⁵Ibid. Hal : 13

Ilustrasi perhitungan pajak pajak terutang pada pajak hiburan yaitu, pajak hiburan yang harus dibayar karaoke Y memiliki omzet Rp 3.824.199,00. Pajak yang harus dibayar :

Gambar 2.2 : Ilustrasi perhitungan Pajak Hiburan

Pajak terutang : tarif pajak x jumlah pembayaran yang dilakukan
Kepada hiburan
: 40% x Rp. 3.824.199,00
: **Rp 1.529.919,60**

Sumber : Data Primer diolah peneliti

9. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Hiburan

Berdasarkan Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 25 menyebutkan bahwa masa pajak hiburan yang bersifat tetap adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender, sedangkan pajak hiburan yang bersifat insedentil masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan yang terutang dalam amsa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.